



**Hermiana Natalia
 Nogo Soge¹
 Andreas Rengga²
 Paulus Juru³**

ANALISIS KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR DALAM MENGUKUR KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI BAPPERIDA

Abstrak

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat adalah tanda perkembangan dunia dewasa ini, yang menuntut semua negara untuk bersaing. Pendidikan adalah komponen penting dalam kemajuan global. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono 2017 adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Aparatur perencanaan di Bapperida umumnya memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang relevan. Namun, terdapat kebutuhan untuk terus meningkatkan keterampilan teknis, seperti penguasaan teknologi perencanaan berbasis data, serta kemampuan analisis dan pemetaan strategis agar dapat merespons tantangan pembangunan secara efektif.

Kata Kunci: Kapasitas; Perencanaan; BAPPERIDA

Abstract

The rapid progress of science and technology is a sign of the development of today's world, which requires all countries to compete. Education is an essential component of global progress. Data collection techniques are a way to obtain data and information related to research. The data collection technique according to Sugiyono 2017 is a method used by researchers to collect the information needed in the research. Planning apparatus in Bapperida generally has relevant educational background and knowledge. However, there is a need to continue to improve technical skills, such as mastery of data-driven planning technology, as well as strategic analysis and mapping skills in order to respond effectively to development challenges.

Keywords: Capacity; Planning; BAPPERIDA

PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat adalah tanda perkembangan dunia dewasa ini, yang menuntut semua negara untuk bersaing. Pendidikan adalah komponen penting dalam kemajuan global. Untuk meningkatkan kualitas suatu negara dan unggul dalam persaingan global, pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Untuk mencapai kesejahteraan nasional, pendidikan dianggap sebagai komponen yang paling penting dan strategis. Pendidikan membutuhkan sumber daya manusia yang cerdas dan berkarakter, sedangkan sumber daya manusia yang rendah akan menghasilkan hasil yang buruk dan tidak dapat diandalkan dalam persaingan global. Oleh karena itu, pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu alat utama untuk mengubah dunia. Ini berarti bahwa pendidikan adalah faktor utama yang menentukan kelangsungan hidup suatu negara.

Saat ini persaingan di dunia kerja sangat meningkat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat mencerminkan dinamika global yang menuntut setiap negara untuk beradaptasi dan bersaing. Dalam konteks ini, pendidikan memainkan peran krusial sebagai fondasi untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Negara yang mampu menghasilkan individu cerdas dan berkarakter akan lebih mampu bersaing di panggung internasional, sementara Negara yang mengabaikan pendidikan berisiko mengalami stagnasi dan keteringgalan. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan bukan hanya sekadar upaya untuk

^{1,2,3} Universitas Nusa Nipa
 email: nataliasoge834@gmail.com

meningkatkan pengetahuan, tetapi juga merupakan strategi jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan Nasional dan menciptakan masyarakat yang tangguh, yang siap menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya alat untuk mengubah individu, tetapi juga kunci untuk memastikan kelangsungan hidup dan kemajuan suatu negara di era persaingan yang semakin ketat.

Pada bab I pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, negara, dan agama. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi drinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam dunia perguruan tinggi, pendidikan masih terbatas pada pemberian teori dan praktik dalam skala kecil dan intensitas yang terbatas. Untuk mendukung aspek pendidikan di perguruan tinggi agar mahasiswa menjadi profesional dan siap untuk bersaing di dunia kerja. Program "Merdeka Belajar Kampus Merdeka", yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, memungkinkan siswa mengambil bagian dalam kegiatan di luar pendidikan, seperti magang di pemerintahan atau tempat kerja lainnya. Magang harus dilakukan dengan bimbingan guru untuk meningkatkan kemampuan siswa.

Mengikuti kebijakan Kemendikbud tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKB), masing-masing prodi di Universitas Nusa Nipa mulai menerapkan program MBKM. Prodi Manajemen, misalnya, memilih untuk menerapkan program magang sebagai MBKM untuk mempersiapkan mahasiswa untuk bersaing di dunia kerja nyata. Magang adalah jenis perkuliahan di mana Mahasiswa berhadapan langsung dengan dunia kerja di lapangan. Tujuan magang kerja adalah untuk memberikan pemahaman bagi Mahasiswa mengenai dunia kerja sehingga Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuannya di masa depan. Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sikka adalah salah satu tempat penyedia magang kerja. Dalam menjalankan fungsinya, Bapperida membantu pemerintah dalam bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, yang mencakup penelitian, pengembangan, dan pengkajian. Dalam pelaksanaan tugasnya Bapperida menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah, untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah, dengan fungsi antara lain:

1. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan Riset dan Inovasi di Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan Riset dan Inovasi di Daerah;
3. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan Riset dan Inovasi di Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Riset dan Inovasi di Daerah;
5. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi di Daerah;
6. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah dari seluruh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib urusan pemerintahan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

7. Perumusan dan penyusunan rencana pembangunan daerah baik rencana pembangunan jangka panjang jangka menengah dan tahunan;
8. Pengembangan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
9. Perumusan dan penyusunan rencana Riset dan Inovasi Daerah dan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Saat ini penulis melaksanakan magang pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD). Bidang PPEPD mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan, pendanaan, pengendalian, evaluasi, data dan pelaporan pembangunan Daerah. Bidang PPEPD menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Penyusunan perencanaan program anggaran dan sumber daya kerja bidang, Pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
2. Pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah.
3. Pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
4. Pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
5. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah
6. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
7. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
8. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
9. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
10. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
11. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan Daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
13. Pengelolaan dan penyusunan hasil analisis dan evaluasi untuk pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
14. Pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan;
15. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan Daerah;
16. Pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah dan;
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Secara operasional pelaksanaan tugas bidang PPEPD merupakan salah satu bidang yang menjalankan tugas utama Bapperida dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Sikka dari tahun ke tahun terus dilakukan agar mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Dari pengertian Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.

METODE

Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan pada kantor Badan Perencanaan Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) di Jalan Mawar Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.

Kegiatan magang kerja dijalankan selama kurang lebih tiga bulan terhitung dari tanggal 02 September 2024 sampai tanggal 16 Desember 2024.

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono 2017 adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Dalam melakukan pengumpulan data penulis melakukan teknik metode wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mulai melaksanakan kegiatan magang pada hari Senin, 02 September 2024. Kegiatan Magang dilaksanakan kurang lebih 3 bulan dengan mengikuti jadwal kerja yang berlaku yaitu setiap hari senin sampai dengan hari jumat. Waktu pelaksanaan kegiatan magang setiap harinya dimulai dari jam 07:30 sampai dengan 16:00 WITA. Selama Magang di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) penulis ditempatkan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD). Kegiatan/aktivitas yang dilakukan oleh penulis selama magang di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah adalah :

1. Membuat susunan perolehan pencapaian dari beberapa indikator yang ada pada Siperindu untuk data Provinsi dan Kabupaten;
2. Mengikuti acara serah terima jabatan baru dan pelaporan kegiatan yang ada di masing-masing bidang;
3. Membantu membuat program kebijakan pemerintah berdasarkan hasil data rekomendasi yang telah dibuat;
4. Mengikuti pertemuan tentang penyusunan profil Kabupaten Sikka bersama kepala bidang PPEPD dan para staf;
5. Menulis nomor surat SPT dan SPPD pegawai Bapperida;
6. Melanjutan pembuatan capaian indikator 5 tahun terakhir untuk kebijakan pemerintah;
7. Membaca buku RPJMB untuk tahun 2025- 2029;
8. Membantu melengkapai berkas-berkas yang masih memiliki catatan seperti belum stempel belakang, nomor SPPD dan SPT dan lain-lain;
9. Membantu penginputan data BG dan SG rekapan;
10. Mengikuti Zoom di bidang PPEPD bersama dengan bidang PA 2 Provinsi NTT;
11. Kerja bakti bersama pegawai di halaman kantor sesuai dengan bidang masing-masing;
12. Menulis daftar hadir untuk evaluasi dan fasilitasi RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2024;
13. Membantu menginput data realisasi anggaran tahun 2019-2024;
14. Membuka file dan memeriksa data-data yang masih kurang dan mengisi data yang masih kurang tersebut untuk program rancangan APBD 2025;
15. Membantu menjilid kontrak swakelola;
16. Mengantar surat untuk registret surat SPD, SPPD di ruangan sekretaris;
17. Membantu menginput data rekapan DAK fisik Kabupaten Sikka tahun 2019-2024;
18. Diskusi bersama bidang PPEPD untuk persiapan perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
19. Membantu print dokumen Rancangan Teknokraktik RPJMD Kabupaten Sikka tahun 2025-2029;
20. Mengikuti Zoom meeting Skala NTT terkait KEM-PPKF;
21. Mengikuti zoom meeting mengenai Asistensi Penggunaan Modul Informasi Pembangunan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Mengikuti Live Streaming bersama Ditjen Bina Keuangan Daerah;
23. Membersihkan dan merapikan ruangan bersama pegawai di bidang PPEPD;
24. Mengantar surat SPT dan SPPD kepada ketua PLT untuk ditandatangani;
25. Melakukan perjalanan dinas pada Kantor Camat Koting, kantor camat Bola, kantor camat Doreng dan kantor camat Tanawawo.
26. Membantu merekap data indikator untuk dokumen RKPD 2026;
27. Membantu mengisi tambahan indikator yang belum terselesaikan;
28. Mengikuti rapat mengenai DAK FISIK bersama Dinas Kesehatan, Dinas PKO, PUPR, Perpustakaan daerah, dan PU;
29. Kunjungan DPK ke kantor Bapperida;
30. Pembuatan laporan perjalanan dinas;
31. Melanjutkan pembuatan laporan perjalanan dinas;
32. Membantu melengkapi SPT dan SPPD yang masih kurang;
33. Melanjutkan melengkapi SPT dan SPPD;
34. Pertemuan Intern mengenai realisasi anggaran pada bidang PPEPD;

35. Menulis dan memperbaiki surat SPPD yang belum lengkap;
36. Mengantar surat untuk evaluasi triwulan III di dalam daerah dan beberapa instansi pemerintahan;
37. Mengikuti rapat evaluasi Triwulan III Tahun 2024-2025 bersama PJ Bupati dan semua perangkat Daerah di Kabupaten Sikka;
38. Membantu mengecek dokumen yang belum selesai di paraf;
39. Membantu mencap dokumen perjalanan dinas di dalam daerah dan luar daerah;
40. Mengambil nomor surat di sekretariat;
41. Kerja bakti bersama pegawai Bapperida;
42. Mengikuti rapat intern pada bidang PPEPD bersama kepala bidang dan pegawai bidang PPEPD;
43. Membantu menulis surat SPT, SPPD, dan Laporan perjalanan dinas;
44. Melengkapi Surat SPT dan SPPD;
45. Mengikuti rapat internal pada bidang PPEPD bersama kepala bidang dan pegawai pada bidang PPEPD untuk membahas mengenai persiapan evaluasi RPJPD, Restra dan DPA pada setiap Instansi Pemerintahan Kabupaten Sikka;
46. Mengantar daftar hadir kepada peserta asistensi untuk ditandatangani;
47. Mengikuti asistensi bersama untuk membahas mengenai RPJPD, RESTRA dan DPA setiap instansi pemerintahan di Kabupaten Sikka.

Pembahasan

Sebagai mana diuraikan sebelumnya bahwa tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui mengenai bagaimana Analisis Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Mengukur Kualitas Perencanaan Pembangunan di Bapperida. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan di Bapperida berjalan dengan optimal dan mampu menghasilkan dampak positif bagi masyarakat.

Kapasitas sumber daya aparatur adalah kemampuan individu atau kelompok aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien. Kapasitas ini meliputi kompetensi, keterampilan teknis, kapasitas manajerial, integritas dan komitmen, kapasitas sosial dan komunikasi dan penguasaan kebijakan dan regulasi. Kapasitas ini mencakup berbagai aspek penting yang saling mendukung dalam mewujudkan kinerja organisasi yang optimal.

Perencanaan pembangunan merupakan proses sistematis dalam menentukan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan terarah. Perencanaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien, sekaligus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya. Perencanaan pembangunan merupakan proses sistematis yang melibatkan serangkaian langkah dalam menentukan tujuan, strategi, dan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan terarah. Proses ini dimulai dengan analisis mendalam terhadap kondisi saat ini, termasuk identifikasi tantangan dan peluang yang ada di masyarakat. Dengan memahami konteks lokal, perencanaan pembangunan dapat dirumuskan dengan lebih tepat, sehingga dapat menjawab kebutuhan spesifik masyarakat. Tujuan utama dari perencanaan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Dalam perencanaan pembangunan, penting untuk memperhatikan berbagai aspek yang saling terkait, seperti sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya. Aspek sosial mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memastikan akses yang adil terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, aspek ekonomi berfokus pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Di sisi lain, perhatian terhadap aspek lingkungan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas pembangunan terhadap ekosistem. Selain itu, aspek budaya harus dihormati dan dilestarikan, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertahankan identitas dan nilai-nilai lokal. Dengan pendekatan yang holistik ini,

perencanaan pembangunan dapat menciptakan sinergi antara berbagai sektor, sehingga menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Indikator Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pemahaman aparatur terkait kebijakan dan regulasi terkait perencanaan pembangunan.

Jawaban:

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menerangkan bahwa “Aparatur di Bapperida memiliki pemahaman yang memadai yang dapat dilihat berdasarkan indeks ASN Aparaturnya, aparatur di Bapperida bekerja secara Profesionalitas dan dapat dilihat juga berdasarkan output dari aparatur tersebut dan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan di Bapperida, kapasitas ASN aparaturnya yang ada cukup memadai sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya masing-masing.”

a. Menurut jabatan fungsional ahli perencana menerangkan bahwa :“Aparatur sebagian besar belum mencapai 100% untuk memahami kebijakan dan regulasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan.”

b. Menurut Pranata Komputer menerangkan bahwa :“Sebagian besar aparatur paham dengan baik dalam memahami regulasi terkait perencanaan pembangunan.”

Berdasarkan pernyataan dari ketiga responden diatas maka penulis menerangkan bahwa tingkat pemahaman aparatur terhadap kebijakan dan regulasi perencanaan pembangunan masih bervariasi. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, disarankan agar pemerintah daerah secara berkala menyelenggarakan pelatihan dan workshop yang fokus pada pemutakhiran pengetahuan aparatur terkait kebijakan dan regulasi terbaru. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas upaya peningkatan kapasitas tersebut.

2. Kemampuan aparatur dalam menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan standar.

Jawaban :

1. Menurut kepala bidang pada bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah PPEPD menerangkan bahwa Kemampuan aparatur terdiri dari : “Membaca regulasi petunjuk terkait dengan perencanaan pembangunan, Petunjuk teknis dari pimpinan perangkat daerah terkait dengan bagaimana melaksanakan dengan benar.”

a. Menurut jabatan fungsional ahli perencana menerangkan bahwa : “Kemampuan aparatur diatas rata-rata untuk menangani perencanaan”.

b. Menurut Pranata Komputer menerangkan bahwa :“Sebagian besar aparatur paham dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan.”

Berdasarkan ketiga pernyataan dari responden diatas maka penulis menerangkan bahwa setelah wawancara dengan berbagai pihak di bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD), dapat disimpulkan bahwa secara umum kemampuan aparatur dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dinilai cukup baik. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, yaitu:

- a. Pemahaman terhadap regulasi: Sebagian besar aparatur telah mampu membaca dan memahami regulasi serta petunjuk teknis yang terkait dengan perencanaan pembangunan. Ini menunjukkan adanya upaya untuk mengikuti aturan dan standar yang berlaku.
- b. Penerapan petunjuk teknis: Aparatur dinilai mampu melaksanakan tugas perencanaan sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh pimpinan perangkat daerah. Ini menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam praktik.
- c. Kemampuan teknis: Menurut Jafung Ahli Perencana, kemampuan aparatur dalam menangani perencanaan dinilai di atas rata-rata. Ini mengindikasikan adanya kompetensi teknis yang cukup memadai di kalangan aparatur.

3. Sikap aparatur menunjukkan sikap profesional dalam menjalankan tugas perencanaan pembangunan.

Jawaban :

1. Menurut kepala bidang pada bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah PPEPD menerangkan bahwa :“Sikap aparatur dilihat terkait dengan integritas. Artinya sikap aparatur terkait dengan integritas sejauh mana aparatur menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur, transparan serta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. Hal ini mencakup komitmen untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, atau konflik kepentingan serta kemampuan menjaga kepercayaan publik dalam setiap langkah perencanaan pembangunan. Integritas juga tercemin dari konsistensi antara apa yang mereka ucapkan dan lakukan, sehingga menjadi teladan dalam menciptakan budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.”

a. Menurut jabatan fungsional ahli perencana menerangkan bahwa : “Profesional, dimana sikap, perilaku dan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya sesuai dengan standar yang berlaku berusaha untuk mengutamakan kompetensi, integritas, tanggung jawab serta etika dari masing-masing aparatur.”

b. Menurut Pranata Komputer menerangkan bahwa :“Sebagian besar aparatur profesional dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.”

Berdasarkan ketiga pendapat diatas maka berbagai pihak di bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD), dapat disimpulkan bahwa secara umum, bahwa sikap profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas perencanaan pembangunan dinilai cukup baik. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, yaitu:

- a. Integritas tinggi: Para aparatur dinilai memiliki integritas yang tinggi, tercermin dari komitmen mereka untuk menjalankan tugas dengan jujur, transparan, dan akuntabel. Mereka juga berusaha menghindari konflik kepentingan dan menjaga kepercayaan publik.
 - b. Kompetensi memadai: Aparatur dinilai memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas perencanaan. Mereka berusaha mengutamakan kompetensi, integritas, tanggung jawab, dan etika dalam bekerja.
 - c. Orientasi pada kepentingan masyarakat: Aparatur menunjukkan orientasi yang kuat pada kepentingan masyarakat. Mereka berusaha untuk menciptakan budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
4. Jumlah dan kualifikasi aparatur menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan apakah kebutuhan perencanaan dapat terpenuhi secara optimal.

Jawaban :

1. Menurut Kepala bidang pada bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah PPEPD menerangkan bahwa“Untuk saat ini jumlah aparatur di Bapperida dinilai sudah memadai, terutama jika dilihat dari latar belakang ilmu pengetahuan mereka yang relevan dengan regulasi perencanaan pembangunan. Artinya, sebagian besar aparatur memiliki keahlian dan pemahaman yang cukup tentang peraturan, prosedur serta prinsip-prinsip dasar perencanaan yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembangunan secara efektif. Hal ini menjadi modal penting dalam menjalankan tugas-tugas strategis, meskipun peningkatan kompetensi dan pelatihan lanjutan tetap diperlukan untuk menghadapi dinamika dan tantangan baru di bidang perencanaan.”

a. Menurut Jabatan fungsional ahli perencana menerangkan bahwa : “Untuk sementara jumlah kualifikasi aparatur cukup bisa ditangani.”

b. Menurut Pranata Komputer menerangkan bahwa “Untuk perencanaan masi kurang personil atau aparatur”.

Berdasarkan pendapat diatas maka penulis dapat menerangkan bahwa aparatur di bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD), diperoleh gambaran yang beragam mengenai jumlah dan kualifikasi aparatur yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan. Untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas dalam bidang perencanaan, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Evaluasi kebutuhan: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebutuhan sumber daya manusia di bidang perencanaan untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan.
- b. Perencanaan kepegawaian: Menyusun rencana kepegawaian yang jelas dan terukur untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang.

- c. Pelatihan dan pengembangan: Secara berkala menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan bagi aparatur untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan.
5. Pembagian tugas yang jelas dan sesuai dengan kompetensi aparatur merupakan faktor krusial dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan perencanaan.

Jawaban :

1. Menurut Kepala bidang pada bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah PPEPD menerangkan bahwa "Pembagian tugas di Bapperida telah dirancang dengan jelas dan terstruktur, sesuai dengan hierarki yang tercantum dalam struktur organisasi. Setiap bidang memiliki deskripsi tugas dan fungsi yang spesifik, yang disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab masing-masing aparatur di dalamnya. Dengan pembagian tugas yang terorganisir, tata cara pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan secara sistematis, sehingga setiap aparatur memahami tugas yang harus diselesaikan sesuai dengan tanggung jawabnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif, efisien dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas."

a. Menurut jabatan fungsional ahli perencana menerangkan bahwa "Untuk pembagian tugas sesuai dengan tupoksi berdasarkan regulasi perda yang ada."

b. Menurut Pranata Komputer menerangkan bahwa "Aparatur mendapatkan tugas dan tanggung jawabnya secara jelas berdasarkan aturan Perda."

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas di Bapperida telah dirancang dengan baik dan mendukung pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan. Namun, upaya untuk terus meningkatkan efektivitas pembagian tugas perlu dilakukan secara berkelanjutan.

6. Ketersediaan anggaran yang mencukupi merupakan salah satu aspek utama dalam mendukung pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan secara optimal.

Jawaban :

1. Menurut Kepala bidang pada bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah PPEPD menerangkan bahwa "Anggaran yang tersedia di Bapperida saat ini dinilai cukup untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama organisasi, khususnya dalam perencanaan pembangunan. Anggaran tersebut telah dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan operasional serta mendukung berbagai program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas. Selain itu, alokasi anggaran juga telah diatur dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, sehingga dapat digunakan secara optimal tanpa adanya pemborosan, sekaligus memastikan tercapainya tujuan pemerintahan secara efektif. Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, Bapperida mampu menjalankan perannya sebagai instansi perencanaan yang berkontribusi pada pembangunan daerah secara berkelanjutan.

a. Menurut Jabatan fungsional ahli perencana menerangkan bahwa "Untuk anggaran yang disediakan cukup untuk digunakan dalam kebutuhan perencanaan."

b. Menurut Pranata Komputer menerangkan bahwa "Untuk anggaran yang disediakan cukup untuk digunakan dalam kebutuhan perencanaan."

Berkaitan dengan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan anggaran saat ini dinilai cukup memadai untuk mendukung kegiatan perencanaan pembangunan. Namun demikian, upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan memastikan keberlanjutan pembiayaan kegiatan perencanaan tetap perlu dilakukan.

7. Evaluasi rutin terhadap kinerja aparatur dalam perencanaan pembangunan sangat diperlukan untuk memastikan kualitas dan efektivitas perencanaan yang dihasilkan.

Jawaban :

1. Menurut Kepala bidang pada bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah PPEPD menerangkan bahwa "Di Bapperida terdapat evaluasi rutin yang mana dilakukan pada saat evaluasi kinerja aparatur seperti melalui rapat rutin, laporan hasil kerja atau penilaian kinerja individu. Selain itu, evaluasi juga dilakukan secara berkala, seperti dalam bentuk peninjauan terhadap capaian Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) pada periode triwulan atau tahunan. Evaluasi ini tidak

hanya berfungsi untuk mengukur keberhasilan kinerja, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta merumuskan langkah-langkah perbaikan. Dengan demikian, evaluasi rutin ini menjadi alat penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan serta memastikan bahwa setiap bidang bekerjasecara efektif dalam mendukung tujuan organisasi.”

- a. Menurut Jabatan fungsional ahli perencana menerangkan bahwa “Evaluasi dilakukan selama empat kali berdasarkan triwulan.”
- b. Menurut Pranata Komputer menerangkan bahwa :“Evaluasi dilakukan secara berkala.”

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Bapperida telah memiliki sistem evaluasi kinerja yang cukup baik. Namun demikian, upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem evaluasi perlu dilakukan secara berkelanjutan.

8. Tantangan yang dihadapi oleh aparatur dalam menjalankan tugas perencanaan pembangunan dapat memengaruhi efektivitas dan kualitas hasil perencanaan yang dihasilkan.

Jawaban :

1. Menurut Bapak Hilarius Rangga Mesa, S.Si selaku Kepala bidang pada bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah PPEPD menerangkan bahwa “Tantangan yang dihadapi adalah Pemahaman dari perangkat daerah luar yang tidak melaksanakan skedul pelaksanaan dengan baik.”
 - a. Menurut Jabatan fungsional ahli perencana menerangkan bahwa “Kita harus mempelajari regulasi terbaru untuk perencanaan dan harus di update setiap tahun dan Kurangnya SDM yang paham akan aturan-aturan yang terbaru.
 - b. Menurut Pranata Komputer menerangkan bahwa “Kita harus mempelajari regulasi terbaru untuk perencanaan dan harus di update setiap tahun dan Membutuhkan manajemen waktu yang baik.

Berdasarkan pendapat diatas maka penulis menerangkan bahwa Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diharapkan kualitas perencanaan pembangunan dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Indikator Perencanaan Pembangunan

1. Keakuratan, kelengkapan, dan keterkinian data yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan menjadi faktor utama dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas.

Jawaban :

1. Menurut Bapak Hilarius Rangga Mesa, S.Si selaku Kepala bidang pada bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah PPEPD menerangkan bahwa “Data yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan di Bapperida telah disusun dengan baik dan memiliki tingkat akurasi serta kejelasan yang tinggi. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber yang kredibel dan relevan, sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan serta program pemabangunan. Selain itu, proses pengolahan dan analisis data dilakukan secara sistematis, memastikan bahwa informasi yang digunakan benar-benar valid, terukur dan sesuai dengan kebutuhan perencanaan. Dengan menggunakan data yang akurat dan jelas, proses perencanaan pembangunan menjadi lebih terarah, transparan dan mampu menjawab kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh daerah.”
 - a. Menurut Jabatan fungsional ahli perencana menerangkan bahwa“Data yang ada adalah hasil dari pengolahan data yang di ambil dari berbagai sumber. Contohnya kolaborasi antara pemerintah OPD dengan pemerintah dari BPS serta sumber-sumber yang mendukung data perencanaan.”
 - b. Menurut Pranata Komputer menerangkan bahwa “Data yang ada adalah hasil dari pengolahan data yang di ambil dari berbagai sumber. Contohnya kolaborasi antara pemerintah OPD dengan pemerintah dari BPS serta sumber-sumber yang mendukung data perencanaan.”

Berdasarkan pendapat diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa Data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan di Bapperida dinilai telah cukup akurat, lengkap, dan terkini. Hal ini didukung oleh berbagai sumber data yang kredibel, proses pengolahan data yang sistematis, dan upaya untuk menjaga kualitas data.

2. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pemerintah lainnya, merupakan langkah penting untuk memastikan proses perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Jawaban :

1. Menurut Kepala bidang pada bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah PPEPD menerangkan bahwa “Proses perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten/kota. Pada setiap tahapan tersebut, semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat, pemerintahan serta pihak terkait lainnya, diundang untuk berpartisipasi aktif dalam menyusun rencana pembangunan. Musrenbang ini menjadi wadah untuk mengumpulkan aspirasi dan masukan dari berbagai pihak, untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan mencakup kebutuhan dan prioritas yang relevan dengan kondisi dan potensi daerah. Dengan melibatkan berbagai pihak, proses perencanaan menjadi lebih inklusif, transparan dan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan”
 - a. Menurut Jabatan fungsional ahli perencana menerangkan bahwa “Proses perencanaan yang dilakukan di Bapperida contohnya melalui Musrenbang RKPd baik dalam Kecamatan maupun Kabupaten dimana pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan menerima masukan.”
 - b. Menurut Pranata Komputer menerangkan bahwa “Proses perencanaan yang dilakukan di Bapperida diadakan kegiatan musrenbang dengan tujuan untuk penjarangan usulan dari tingkat desa sampai Kabupaten.”

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Bapperida telah menunjukkan komitmen untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini merupakan langkah yang positif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat. Proses perencanaan pembangunan di Bapperida melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui Musrenbang. Keterlibatan ini meningkatkan legitimasi, kualitas, dan ownership terhadap rencana pembangunan. Namun, perlu terus ditingkatkan kualitas partisipasi dan implementasi hasil Musrenbang.

3. Pemanfaatan hasil evaluasi perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan berikutnya sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan relevansi perencanaan.

Jawaban :

1. Menurut Kepala bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menerangkan bahwa “Hasil evaluasi perencanaan penyusunan rencana pembangunan yaitu terdiri dua aspek yaitu Terhadap kinerja perencanaan sudah mencapai 100%. (bisa direncanakan dan tidak bisa direncanakan lagi). dan Yang belum mencapai 100% dialokasikan untuk melakukan. Sedangkan yang sudah mencapai target tetap dipertahankan.
 - a. Menurut Jabatan fungsional ahli perencana menerangkan bahwa “Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan menjadi dasar atau kebijakan dalam perencanaan untuk tahun berikutnya.”
 - b. Menurut Pranata Komputer menerangkan bahwa “Perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya dilakukan berdasarkan pedoman evaluasi sebelumnya.”

Berkaitan dengan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bapperida telah menerapkan mekanisme yang baik dalam memanfaatkan hasil evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan perencanaan pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada hasil. Hasil evaluasi perencanaan pembangunan sebelumnya secara aktif digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana pembangunan untuk tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan.

4. Hasil dari proses perencanaan yang berkualitas seharusnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pembangunan.

Jawaban :

1. Menurut Kepala bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menerangkan bahwa “Hasil dari proses perencanaan pembangunan yang dilakukan secara baik dan terstruktur dapat berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pembangunan. Perencanaan yang matang dan berbasis data memungkinkan pemerintah untuk menetapkan prioritas pembangunan yang tepat, mengalokasikan sumber daya secara efisien, serta mengidentifikasi potensi dan tantangan yang ada. Proses perencanaan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat, sektor, swasta dan lembaga terkait juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sehingga pembangunan yang dilaksanakan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.”
 - a. Menurut Jabatan fungsional ahli perencana menerangkan bahwa “Diharapkan demikian berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan. Dampaknya banyak untuk kemajuan masyarakat Nian Tana Sikka.”
 - b. Menurut Pranata Komputer menerangkan bahwa “Kiranya diharapkan demikian yang bergantung kepada dinas-dinas teknis program kegiatan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan yang baik merupakan fondasi yang kuat untuk membangun daerah. Namun, untuk memastikan bahwa perencanaan tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat. Proses perencanaan yang baik memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta dukungan dari berbagai pihak terkait.

SIMPULAN

1. Kompetensi Individu
Aparatur perencanaan di Bapperida umumnya memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang relevan. Namun, terdapat kebutuhan untuk terus meningkatkan keterampilan teknis, seperti penguasaan teknologi perencanaan berbasis data, serta kemampuan analisis dan pemetaan strategis agar dapat merespons tantangan pembangunan secara efektif.
2. Keterampilan Teknis
Merupakan elemen penting dalam kapasitas sumber daya aparatur perencanaan pembangunan di Bapperida. Keterampilan ini mencakup kemampuan teknis aparatur dalam mengelola informasi, data, teknologi dan prosedur yang relevan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang efektif dan berkualitas.
3. Kapasitas Manajerial
Kapasitas manajerial adalah kemampuan seorang individu atau kelompok dalam organisasi untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi, kapasitas manajerial mencakup keterampilan, pengetahuan, sikap, serta sistem dan struktur yang mendukung pengelolaan yang efektif dan efisien. Kualitas Perencanaan Pembangunan Kapasitas sumber daya aparatur yang ada telah menghasilkan perencanaan pembangunan yang cukup baik, meskipun masih perlu peningkatan pada aspek inovasi, inklusivitas, dan keberlanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan juga perlu terus dioptimalkan.
4. Integritas dan Komitmen
Integritas dan komitmen merupakan aspek penting dalam kapasitas sumber daya aparatur, terutama dalam konteks perencanaan pembangunan di Bapperida.
5. Kapasitas Sosial dan Komunikasi
Kapasitas sosial dan komunikasi sangat penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, terutama di lembaga Bapperida yang berperan dalam merencanakan pembangunan daerah.
6. Penguasaan Kebijakan dan Regulasi
Merupakan salah satu dimensi utama dalam menilai kapasitas sumber daya aparatur terutama di Bapperida. Hal ini penting menjadi acuan dalam penyusunan, Analisis kapasitas

ini dapat mencakup sejauh mana aparatur memahami, menerapkan dan menyesuaikan kebijakan serta regulasi dalam mendukung pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, O., & Johannes, W. (n.d.). Penerapan Kompetensi Aparatur Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau.
- Budiarti, E. M., Hakim, L., Aziz, A. A., Falah, M. S., & Kurniawan, A. (2024, December). Analisis Kebutuhan Pelatihan Penyusunan Program Kerja Sekolah Berbasis Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar Ruhul Jadid Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 405-413).
- Baddeley, A. D., & Hitch, G. J. (1974). Working memory. In G. H. Bower (Ed.), *The psychology of learning and motivation: Advances in research and theory* (Vol. 8, pp. 47–89). Academic Press.
- Conyers, D. (1990). *The Planning Process in Development: Approaches and Issues*. Jakarta: Penerbit JKL.
- Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial, S., Alfansyur, A., & Artikel, R. (2020). Seni Mengelola Data:Penerapan Triangulasi Teknik Info ArtikelAbstrak.5(2), 146–150. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.3432>
- Digital_old18_132561-T 27779-Perhitungan idle-Tinjauan literatur. (n.d.).
- Digital_old18_132561-T 27779-Perhitungan idle-Tinjauan literatur (pengertian kapasitas menurut McNair C.J dan Vangermeersch (1998)). (n.d.).
- Dijadikan Pedoman Dalam Penulisan Skripsi, D., dan Disertasi, T., Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan Panduan Umum Skripsi, S., dan Disertasi Oleh Sufian Hamim, T., & Si, M. (n.d.). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan Uir Press ii Perpustakaan Nasional : katalog dalam terbitan (KDT)*.
- Dwiyanto, A. (2003). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- faishalaminuddin,+bambang+setiyono. (n.d.).
- Florantino, A., Wellem, I., & Transilvanus, V. E. (2024). Efektifitas Perencanaan Penanganan dalam Upaya Percepatan Pengentasan Permukiman Kumuh. *Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 563–568. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.9573>